

RESPON GURU ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SERTIFIKASI: STUDI PADA KKG DAN MGMP DI KABUPATEN SEMARANG

Amin Yusuf

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP Unnes

E-mail: yusuf_lemlit@yahoo.com

Abstract

It is important to know the role of the teachers' reaction toward the Certification Program because based on the data we can identify their perception about the program so that we can plan the necessary steps according to the program. This a qualitative research taking as respondents the primary and the secondary teachers joined in the teachers association KKG and MGMP. They were classified in 4 categories: (1) those who have not the S1 degree or still studying to obtain the degree. (2) those having the S1 degree with 0-5 year experience. (3) those having the S1 degree with 6-10 year experience. and (4) those who have been certificated. The results showed that they considered the program more as welfare project, not as a program of professional enhancement.

Kata Kunci: respon, implementasi kebijakan, dan sertifikasi guru

PENDAHULUAN

Genderang sertifikasi guru telah ditabuh. Pencanaan, sosialisasi, uji kompetensi, dan pendataan pun telah dilakukan sejak akhir tahun 2006 hingga pertengahan tahun 2007. Di penghujung tahun 2007, *self appraisal* dan *portofolio* program sertifikasi telah dilakukan bagi sejumlah guru, dan hasilnya pun sejumlah guru telah berhasil lolos sertifikasi, serta sebagian lain masih dilakukan pembinaan bagi yang belum lolos. Konon sudah ribuan guru di Indonesia yang telah mendapat asesmen sertifikasi dari pelbagai *LPTK* yang terdapat di Indonesia.

Berdasarkan data statistik nasional yang dikeluarkan oleh Balitbang Diknas tahun 2004, menunjukkan bahwa dari sekitar 175 ribu guru *TK*, 1,3 juta guru *SD*, dan 550 ribu guru *SLTP*, masih banyak yang belum menyelesaikan pendidikan penyeteraan D2 untuk guru *TK* dan *SD*, dan D3 untuk guru *SLTP* akibat sistem penyelenggaraan yang kurang efektif. Belasan ribu guru lainnya, setiap tahun masuk ke dalam sistem D2 tanpa ada kepastian berapa lama mereka akan berada

di sana. Walaupun pendataan tersebut dilakukan pada tahun 2004, akan tetapi hingga kini belum ada perubahan yang signifikan. Dengan demikian sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru, dan meningkatkan kesejahteraan dan jaminan finansial guru secara layak sebagai profesi.

Penelitian mengenai *respons* guru atas kebijakan tersebut menjadi amat penting, dengan tujuan untuk mengetahui komitmen dan pola-pola antisipatif di kalangan para guru atas kebijakan program sertifikasi, khususnya bagi guru-guru yang masih butuh persiapan untuk mengikuti program sertifikasi. Diketahui bersama bahwa kategori guru yang belum tersertifikasi jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru-guru yang telah lulus sertifikasi.

Peranan *respons* di kalangan para guru atas kebijakan sertifikasi besar sekali. Dengan mengetahui *respons*, dapat diidentifikasi pola-pola perilaku guru dalam melakukan pemahaman, langkah antisipatif, dan langkah penyesuaian diri terhadap kebijakan program sertifikasi. Apalagi

program tersebut bukan saja mengikat diri para guru, akan tetapi dapat memberi dampak finansial dan memberi pengakuan atas profesi mereka.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan berbagai informasi mengenai respons atau kesiapan guru dalam bentuk pemahaman, adaptasi diri, dan langkah antisipatif atas implementasi program sertifikasi, sehingga masukan itu tentu dapat dijadikan bahan pertimbangan penyempurnaan program di waktu mendatang.

Merujuk pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Sisdiknas, menuntut bahwa guru dan dosen wajib memiliki serifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Istilah sertifikasi dalam kamus bahasa Indonesia berarti surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelaikan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru, agar dianggap laik dalam mengemban tugas profesi mendidik, ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan.

Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1, ayat 11 UUGD, adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 7, bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi, dinyatakan dalam Pasal 8, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengenai apa itu sertifikasi pendidik, Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa, sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan

yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Pasal 11 ayat 2, menyatakan sertifikasi pendidik tersebut hanya dapat diperoleh melalui program sertifikasi. Untuk itu, guru dapat memperoleh sertifikasi pendidik jika telah memenuhi dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimal (ijazah S1/D4) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu (empat kompetensi dasar). Berkaitan dengan kompetensi tersebut, maka untuk menjadi guru diperlukan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimal (ijazah S1/D4) dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Kedua hal tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Secara umum *siapa saja dalam dunia pendidikan ini yang harus disertifikasi?* Jawabannya dengan jelas, yaitu tenaga kependidikan. *Mengapa?* Karena merekalah yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan. Tetapi, apabila dieksplisitkan lagi, mereka adalah guru dan dosen. Selanjutnya *guru yang mana yang berhak melakukan proses sertifikasi?* Ada dua sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi, yaitu *Pertama*, mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non-kependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, dan *kedua*, para guru dalam jabatannya. Bagi lulusan sarjana pendidikan maupun nonkependidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal, dan baru kemudian menempuh pendidikan profesi. Setelah mengikuti pendidikan profesi kemudian mengikuti proses sertifikasi. Apabila dinyatakan lulus dalam uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berperspektif profesi. Oleh sebab itu harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S1 kependidikan yang tidak menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, dan pintu masuk bagi lulusan S1 nonkependidikan yang ingin masuk menjadi guru. Adapun bagi mereka yang telah menjabat sebagai

guru, terdapat beberapa syarat yang harus dilalui.

Menurut Peraturan Pemerintah, bagi guru yang sudah memiliki pendidikan minimal sarjana dikategorikan dalam dua bentuk: *pertama*, bagi guru-guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 kependidikan atau pun non-kependidikan yang telah memiliki akta mengajar relevan langsung dapat mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus, dan memperoleh sertifikat pendidikan; *Kedua*, bagi guru yang memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4 nonkependidikan yang belum memiliki akta mengajar yang relevan, langsung wajib mengikuti pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi guru, melalui uji kompetensi sesuai jenjang dan jenis pendidikan sampai dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

Mekanisme sertifikasi guru dapat dilakukan melalui dua bentuk; *pertama*, sertifikasi bagi calon guru untuk menjadi guru profesional; dan *kedua*, sertifikasi bagi guru yang telah memiliki jabatan (sertifikasi guru dalam jabatan). Sertifikasi bagi calon guru dapat ditempuh setelah yang bersangkutan memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4, baik yang berlatar belakang pendidikan maupun non-kependidikan dengan syarat bahwa keserjanaan tersebut relevan dengan jenjang dan jenis serta mata pelajaran yang akan diampu. Bagi guru pada jenjang pendidikan dini Taman Kanak-kanan (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) misalnya, pendidikan keserjanaan yang relevan berasal dari sarjana pendidikan guru Taman Kanak-kanan (PGTK) atau sarjana pendidikan guru raudhatul athfal (PGRA), sarjana psikologi atau sarjana S1/D4 pendidikan atau non-pendidikan lainnya yang relevan. Setelah kualifikasi pendidikan minimum yang relevan

terpenuhi, selanjutnya dapat mengikuti pendidikan profesi guru.

Apabila pendidikan profesi tersebut dipadukan dengan sertifikasi melalui uji kompetensi, maka uji kompetensi tersebut berada di akhir program pendidikan profesi. Jadi sertifikasi yang berbentuk uji kompetensi guru dilakukan pada akhir pendidikan profesi yang dilakukan secara terintegrasi.

Adapun sertifikasi guru dalam jabatan, dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok; *Pertama*, bagi yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimum S1/D4, maka yang bersangkutan harus mengikuti program peningkatan kualifikasi akademik sesuai dengan bidang studi pada perguruan tinggi yang terakreditasi yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi guru dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sampai lulus sebelum mengikuti sertifikasi melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, bagi guru yang memiliki keserjanaan nonkependidikan yang belum memiliki akta IV, maka yang bersangkutan harus mengikuti terlebih dahulu pendidikan profesi dengan mempertimbangkan penilaian hasil belajar melalui pengalaman sebelum mengikuti sertifikasi melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, bagi guru yang memiliki keserjanaan atau diploma empat kependidikan atau nonkependidikan yang sudah memiliki akta IV langsung mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh

pemerintah.

Para ahli yang amat terkenal dalam bidang psikologi sosial dan psikologi kepribadian, seperti; *Chave (1928)*, *Bogardus (1931)*, *Lappiere (1934)*, *Mead (1934)*, dan *Gordon Allport (1935)* mendefinisikan respons sebagai *kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek atau stimulus dengan cara-cara tertentu*. Kesiapan yang dimaksud, merupakan suatu kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu atau seseorang dihadapkan pada stimulus yang menghendaki adanya respons itu sendiri.

Allen, Guy, dan Edgley (1980), menjelaskan bahwa respons sebagai *suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana dikatakan bahwa respons adalah reaksi terhadap stimuli sosial yang terkondisikan*.

Rosenberg dan Hovland (1960) mengatakan bahwa respons sebagai perwujudan dari sikap seseorang, selalu berperan sebagai perantara yang dapat diukur atas objek yang bersangkutan. Menurutnya, respons dapat diklasifikasikan ke dalam tiga katagori, yaitu: (1) respons perseptual atau respons kognitif, yaitu mengenai hal-hal apa yang dipahami dan diyakini, (2) respons syaraf simpatetik atau respons efektif, yaitu mengenai hal-hal yang dirasakan, dan (3) respons perilaku atau respons konatif, yaitu respons berupa tindakan dan pernyataan mengenai perilaku.

METODE

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kesiapan reaksi di kalangan para guru atas implemenasi kebijakan program sertifikasi sebagai suatu stimulus yang akan mengikat dan berdampak luas bagi para guru. Kesiapan reaksi tersebut akan dikaji melalui bentuk-bentuk respons guru dalam unit kelompok-kelompok satuan kerja, seperti *KKG* untuk guru-guru

SD, dan *MGMP* untuk guru-guru *SLTP*.

Informan penelitian mencakup guru-guru *SD* maupun *SMP* yang tergabung dalam *KKG* maupun *MGMP* di kabupaten Semarang, dengan kriteria mereka yang (1) bekerja sebagai guru negeri (2) belum memiliki kualifikasi akademik minimal atau sedang kuliah di S1, (3) memiliki kualifikasi akademik minimal, dengan pengalaman bekerja mulai 0- 5 tahun, 5-10 tahun, dan (4) kualifikasi akademik kependidikan maupun non-kependidikan.

Karena metode kualitatif, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, sedangkan alat yang dipakai untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dipaparkan informasi mengenai "*respons guru terhadap program sertifikasi*." Ada dua kelompok guru sebagai sumber informasi, yaitu guru-guru SD dan SMP, dengan komposisi: (1) 2 orang guru belum sarjana dan sedang kuliah S1, (2) 2 orang memiliki pengalaman kerja 0-5 tahun, (3) 2 orang memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun, dan (4) 2 orang baru berkesempatan mengikuti proses sertifikasi.

Respon Perseptual Guru

Respon perseptual atau respon kognitif, adalah satu bentuk respon dari individu yang bereaksi atas stimulus yang mereka hadapi. Respon perseptual berbentuk tingkat pemahaman dan keyakinan seseorang terhadap sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan dirinya.

Informan dengan katagori 1, guru SD dan SMP yang sedang melanjutkan studi S1, memberikan pemahaman terhadap program sertifikasi sebagai berikut. "*Asumsi saya setelah guru mendapat sertifikasi, maka ia dijamin layak mengajar, tetapi ternyata itu bukan jaminan. Yang pasti pemahaman saya terhadap sertifikasi itu*

hanya sebatas untuk mendapatkan tambahan gaji ekstra saja. Tidak lebih dari itu, . . . toh faktanya memang tidak ada.”

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh informan dengan katagori 2, guru SD dan SMP yang telah bekerja (0-5 tahun). Menurut mereka berdua: *“Ide sertifikasi guru sebenarnya bagus menurut saya. Ini semacam upgrading terhadap kualitas guru. Pada akhirnya sebenarnya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan reward pada guru agar lebih baik dan berkuaitas. Namun, ternyata kalau pelaksanaannya seperti ini, saya kok jadi pesimis. Tujuan sertifikasi yang sebenarnya bagus tidak akan tercapai. Komersialisasi sertifikasilah yang terjadi, sama kasusnya dengan komersialisasi nilai. Mudah-mudahan ini bukan gejala umum.”*

Pemahaman lain disampaikan oleh informan dengan katagori 3, guru SD dan SMP dengan masa kerja (5-10 tahun). Mereka berdua memahami sertifikasi kurang lebih sebagai berikut: *“Sebenarnya tujuan sertifikasi sih mulia banget, untuk meningkatkan kualitas guru dan sekaligus memperbaiki income guru. Tapi, . . . karena sudah masuk ke orang-orang di senayan yang memiliki banyak kepentingan, menyebabkan proses sertifikasi keadaanya menjadi seperti ini. Sebaiknya untuk guru yang berprestasi saja yang layak mendapatkan karena walau bagaimanapun, ini bukan urusan senioritas yang lebih utama. Kalau kita mau jujur sih, banyak portopolio yang dibuat baru karena alasan klise. Gimana cara ngumpulin berkas yang sudah 20 tahun lalu yang tidak digunakan? Kalau bukan karya sendiri, lantas mau jadi guru yang bersertifikasi, kan lucu jadinya.”*

Informan dengan katagori 4, guru SD dan SMP yang sudah lolos mengikuti proses sertifikasi, memberikan pemahaman sebagai berikut: *“Menurut saya sertifikasi suatu usaha yang baik dari pemerintah kita. Ini merupakan satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan harkat, derajat, dan martabat guru yang cukup*

lama terpukur. Saya pikir dengan sertifikasi, teman-teman akan berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya. Kita patut lho berterima kasih kepada pemerintah, namun demikian pelaksanaannya perlu peningkatan dan pembenahan. Saya maklum dua periode ini pelaksanaannya masih belum tertib, dan masih acak-acakan, tetapi saya optimis kedepannya akan lebih baik.”

Dari keempat katagori informan di atas secara eksplisit tersirat bahwa masih ada keyakinan atas manfaat program sertifikasi guru, meskipun memiliki intensitas yang berbeda. Ia merasa pesimis kalau proses sertifikasi kenyataan yang terjadi seperti sekarang ini. Ungkapan atas keyakinan itu oleh informan dengan katagori 1 disampaikan sebagai berikut: *“Kasihlah guru sejati, yang justru tidak peduli dengan tetek bengek soal sertifikasi, yang hidup untuk menjadikan anak-anak bangsa menjadi baik, lebih berbudi, tapi justru tidak mendapatkan hak, . . . “*

Informan dengan katagori 2, memberikan keyakinan atas program sertifikasi demikian: *“Kalau tidak penuh dengan akal-akalan, namanya bukan Indonesia pak? Di negeri ini, mana ada program idealis yang bebas dari virus dan penyakit seperti itu.”*

Ungkapan senada disampaikan oleh informan dengan katagori 3, *“mengapa guru kok harus bersertifikat? Bukannya yang selalu jadi masalah tuh guru yang jarang digaji? Apa dengan punya sertifikat, sudah terjamin kelangsungan gajinya?”*

Informan dengan katagori 4, menyampaikan keyakinannya atas program sertifikasi yang telah mereka ikuti agak berbeda dengan informan sebelumnya. Mereka mengatakan: *“Program sertifikasi guru bagus kok, siapa bilang jelek? Para pejabat dari jajaran Diknas dan pakar dari perguruan tinggi kependidikan juga ternyata mendukung 100%. Sertifikasi guru mempunyai manfaat lumayan besar. Guru yang akan mendapat sertifikat tersenyum*

penuh harap. Mereka bahagia setelah kebagian rejeki dari sertifikasi. Apa hak kita untuk menggerutu melihat orang lain menikmati kebahagiaan? Siswalah yang seharusnya bertanya, benarkah gurunya makin berkualitas setelah mendapat sertifikat?."

Respon Syaraf Simpatetik

Respon syaraf simpatetik atau respon afektif, yaitu suatu respon yang berkaitan dengan aspek-aspek kesetujuan maupun ketidaksetujuan guru atas dimensi-dimensi implementasi program sertifikasi. Berdasarkan definisi itu, informan dengan katagori 1, menyatakan hal berikut. *"Selama praktik proses sertifikasi yang terjadi seperti ini, meskipun saya setuju, tapi agak pesimis. Menurut saya apapun caranya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan berhasil jika masih terdapat kecurangan seperti itu. Lha kalau gurunya curang, dan malah dianjurkan untuk curang secara berjamaah, maka siswanya pasti lebih parah lagi. Saya ngeri membayangkan masa depan bangsa kalau seperti itu kejadiannya."*

Informan dengan katagori 2, menyatakan sikapnya atas implementasi program sertifikasi kurang lebih demikian. *"Kalau keadaanya seperti ini saya tidak terlalu setuju, walau sertifikasi punya keuntungan relatif bagi saya, paling tidak kalau saya pada saatnya masuk antrian di tingkat dinas kabupaten. Apa tujuan yang idealis dari sang sertifikator? Sebab fakta yang didapat hanya soal penambahan duit, . . . duit, . . . dan duit! Kapan perbaikan mutu diutamakan? Betapa akan bersedihnya bapak Ki Hajar Dewantoro melihat semua ini. Idealisme sudah tergadaikan dengan materialisme. Maafkan kami pahlawan yang tidak bisa meneruskan perjuanganmu."*

Senada dengan ungkapan sikap di atas, informan dengan katagori 3, menyatakan sikapnya demikian. *Semula saya setuju dan optimis dengan adanya*

program sertifikasi guru, karena berarti ada pengakuan yang lebih oleh pemerintah terhadap para guru yang profesional, termasuk tambahan gaji tunjangan. Namun demikian secara pribadi saya agak kecewa, karena ternyata pelaksanaanya di luar harapan guru, walau memang tidak semua guru. Saya justru melihat beberapa orang yang sebenarnya tidak profesional, akan tetapi ternyata lolos sertifikasi. Apakah sertifikasi guru tidak menyimpang dari arah semula yaitu profesionalisme guru?, atau hanya ajang proyek bagi-bagi anggaran oleh para pimpro, assesor, dan lain-lain?."

Pernyataan sikap yang agak berbeda disampaikan oleh informan dengan katagori 4. Mereka menyatakan demikian. *"Sebenarnya saya dan mungkin banyak guru lain, yang merasa senang dan setuju dengan perhatian yang begitu besar dari pemerintah dengan adanya sertifikasi. Bahkan sebelum ada kebijakan sertifikasi, gaji kami para guru sudah cukup lumayan. Bayangkan saja, tetangga saya, yang bekerja di sektor swasta, mereka mendapat gaji hanya sebesar UMR. Itu tidak lebih besar dari gaji seorang tukang kebun sekolah SD. Belum lagi bagi mereka yang bekerja di sektor in-formal, para petani, nelayan, . . . kita masih tetap beruntung, dan tentu harus bersyukur."*

Respon Perilaku

Respon Perilaku, yaitu suatu respon yang dialami/dilakukan oleh guru yang menyangkut langkah-langkah penyesuaian diri atau langkah-langkah antisipatif sebagai bentuk kesiapan atas program sertifikasi yang menerpanya.

Bentuk respon tersebut, diungkap melalui pernyataan informan dengan katagori 1, sebagai berikut: *"Saya ikut kuliah lagi di S1, karena saya dulu cuman dari SPG/PGSLP. Masuk kuliah Cuma hari jumat-minggu, setelah pelajaran selesai, tapi ya tetap saja anak-anak agak terbelengkelai, karena memang di sekolah*

jumlah guru kurang, sedang jumlah atau beban mengajar cukup banyak. Menurut saya yang penting kuliah jalan, mengajar juga jalan, walaupun memang tidak bisa maksimal hasilnya.”

Pernyataan dengan aspek yang sama disampaikan oleh informan katagori 2, yaitu demikian: *“Bagi saya tidak terlalu susah untuk mendapat sertifikat seminar, karena dalam waktu satu bulan dapat diadakan belasan kali seminar untuk guru, coba perhatikan spanduk-spanduk di pinggir atau perempa-tan jalan, semua memuat seminar ini dan itu. Di era teknologi informasi dan komunikasi membuat semua guru akan lebih mudah membuat bahan ajar dan kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk menyusun portopolio.”*

Demikian juga parnyataan informan dengan katagori 3, menyatakan sikapnya sebagai berikut: *“Menurut saya ada aturan yang dibuat tidak masuk akal, masa guru disuruh mengajar 24 jam dalam seminggu, . . . padahal kurikulumnya justru tiap mata pelajaran jamnya malah dikuangi, sehingga sangat tidak mungkin bisa mengajar sesuai dengan tuntutan itu, kecuali guru-guru SD atau guru-guru yang tua saja yang dapat memenuhi aturan.”*

Berbeda pernyataan informan dengan katagori 4, mereka menyatakan sikapnya atas kebijakan sertifikasi sebagai berikut: *“Saya termasuk guru yang sudah lolos sertifikasi untuk periode tahun 2006 angkatan kedua yang baru menerima sekali tunjangan profesi, padahal teman-teman saya yang belakangan mendapat sertifikat ada yang lebih lancar mendapatkan tunjangan itu. Saya tidak habis pikir pada tingkatan mana yang membuat kendala, sehingga banyak teman-teman yang tertunda tunjangannya.”*

Berdasar tiga respon di atas, maka dapat direduksi ke empat kelompok informan menjadi pembahasan dengan variasi respon sebagai berikut:

Kelompok pertama adalah kelompok

guru yang memiliki kemampuan yang agak sulit untuk segera menyesuaikan diri, mereka adalah komunitas laskar pajang, komunitas guru yang dahulu berpendidikan SPG maupun PGSLP/D3 yang agak terlambat untuk meningkatkan kualifikasinya. Mereka kelompok yang dapat dikategorikan sebagai *‘di mana arah angin bertiup’*. Mereka memiliki pengikut yang lumayan banyak, dan sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman bekerja yang sudah di atas 15 tahun.

Kelompok ini merupakan golongan guru yang menyetujui adanya kegiatan sertifikasi, akan tetapi seolah-olah kritis manakala ada kebijakan atau aturan yang berdampak menyulitkan baginya. Golongan ini yakin bahwa kegiatan sertifikasi akan meningkatkan penghasilan saja dan tidak mungkin sekaligus akan meningkatkan kualitas pendidikan. Kelompok ini pula kelompok yang sudah banyak makan asam garam atas pelbagai inovasi yang dikembangkan oleh departemen pendidikan, sehingga mereka paham betul, bahwa ujung-ujungnya sudah dapat mereka tebak. Sikap semacam ini sebenarnya sikap yang cenderung *konservatisme* yang tidak kreatif dan inovatif, tapi mereka mewakili guru penjaga moral.

Kelompok kedua adalah kelompok idealis, yang terdiri atas komunitas guru muda yang kritis dan inovatif. Mereka menginginkan sertifikasi sebagai momentem untuk peningkatan kualitas guru. Keyakinannya cukup konsisten, sehingga jika apa yang mereka pahami tidak sesuai dengan kenyataannya tidak segan-segan mereka untuk mengkritiknya. Meskipun mereka setuju dengan sertifikasi, akan tetapi agak pesimis kalau ternyata prosesnya tidak dapat objektif untuk menghasilkan guru yang profesional.

Kelompok ini melihat bahwa sertifikasi justru dapat menyebabkan guru berhenti belajar, karena sudah merasa mendapat sertifikat dan hebat. Hal ini sangat mungkin terjadi, karena sertifikasi

tidak mengenal jenjang. Seandainya sertifikasi berjenjang, sekurang-kurangnya ada 3 level, mungkin masih ada motivasi belajar dan berkarya untuk mencapai jenjang yang tertinggi.

Dibanding yang pertama, kelompok ini jumlahnya relatif sedikit dan cenderung memiliki sikap akademis yang eksplisit. Mereka menanggapi bahwa kegiatan sertifikasi tidak memiliki akar dukungan akademis yang layak karena diselenggarakan hanya dengan melakukan penilaian terhadap portopolio. Namun begitu kelompok ini sebenarnya masih memiliki sikap politis yang sama dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Mereka sudah tidak mempersoalkan relevansi program tersebut dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan guru. Mereka menyadari bahwa sertifikasi guru adalah 'keputusan politis yang harus diselamatkan'. Sejauh ini guru membutuhkan *peningkatan* dan *kejelasan profesi* yang didukung oleh sistem kebijakan pemerintah (UU Sisdiknas).

Kelompok ketiga adalah kelompok yang kontroversial; mereka menginginkan kenaikan tunjangan, tetapi menolak ide sertifikasi. Kelompok ini memiliki respons syaraf simpatetik yang berisi sikap kesetujuan dan atau ketidak-setujuan para guru terhadap dimensi-dimensi riil implementasi program sertifikasi. Mereka mengaku bahwa masuknya mereka di dalam kegiatan sertifikasi adalah karena mereka tidak berdaya untuk menolak kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan. Mereka ingin meluruskan pelaksanaan sertifikasi dengan alasan pragmatis bahwa mereka memiliki dorongan untuk mendapatkan tambahan penghasilan sebagai guru. Mereka mengaku tergiur dengan penghasilan tambahan satu kali gaji pokok untuk setiap guru yang dinilai cukup signifikan untuk tambahan penghasilan keluarga.

Kelompok ketiga ini bahkan merupakan komunitas terbesar dari para

guru, dan mereka sesungguhnya berasal dari komunitas yang tidak terlalu beda dengan kelompok satu, tetapi karena ada varian lain yang menjadi bagian dari komunitasnya menyebabkan sedikit lebih moderat.

Kelompok keempat adalah kelompok guru yang paling diuntungkan. Umumnya terdiri dari guru-guru senior, tidak sedikit di antara mereka yang memegang jabatan sebagai kepala sekolah. Kelompok ini memiliki respon yang defensif terhadap kebijakan sertifikasi, karena merekalah yang paling awal menikmati nilai tambah dari sertifikasi. Itupun kalau benar dan lancar, karena ada sebagian dari komunitas ini yang masih kecewa, lantaran gaji tunjangan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang.

Menurut komunitas lain, kelompok ini tidak selalu mencerminkan sebagai guru yang profesional, bahkan dalam banyak hal mereka kelompok yang konservatis, kurang moderniti, tidak inovatif, dan memiliki speed yang rendah dalam mengadaptasi setiap perubahan yang terjadi. Kelebihannya karena mereka lebih lekat dengan kekuasaan, sehingga dengan berlindung di balik sumber kekuasaan yang dimiliki mereka menampilkan diri sebagai topeng pembaharu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut.

- 1) Respons perseptual yang terjadi di kalangan para guru atas implementasi kebijakan program sertifikasi menunjukkan bahwa di mata para guru sertifikasi sebenarnya identik dengan tambahan 1 kali gaji pokok.
- 2) Respons syaraf simpatetik yang terjadi pada empat kelompok guru dapat dibedakan ke dalam tiga area suasana batin, yaitu: (1) kelompok yang ingin mewujudkan harapan, tetapi masih jauh

- dari kenyataan, (2) mereka yang berjuang untuk mewujudkan harapan, karena sudah dekat dengan kenyataan, dan (3) kelompok yang sudah merasakan dan dapat mewujudkan impian menjadi kenyataan. Tiga area suasana ini yang membuat sensitifitas berbeda dalam merespon sesuatu yang terkait dengan persoalan sertifikasi.
- 3) Respon perilaku atau konatif yang terjadi pada empat kelompok guru, sangat tergantung pada respon syaraf simpatetik yang direduksinya. Berdasarkan ketiga area suasana batin, maka keempat kelompok guru dapat dibedakan respon konatifnya sebagai berikut: (1) kelompok guru katagori di mana arah angin bertiup, (2) kelompok guru katagori idealis, (3) kelompok guru katagori kontroversi, dan (4) kelompok empat guru katagori *status quo*.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Proses penjenjangan maupun durasi masa sertifikasi perlu dilakukan oleh pemerintah, supaya program sertifikasi tidak dimaknai sempit oleh guru hanya sekedar tambahan satu kali gaji pokok. Proses penjenjangan maupun tenggang waktu menjadi penting supaya tidak terjadi stagnasi bagi guru yang telah mendapat sertifikat, akan tetapi guru harus menjadi profesi yang terus belajar (*to be continuously learning*).
- 2) Perbaikan harus terus dilakukan oleh pelbagai pihak yang terkait dengan persoalan sertifikasi. Tentunya perbaikan yang lebih mempermudah orang, tetapi tanpa meninggalkan tujuan peningkatan profesionalitas guru.
- 3) Persoalan sertifikasi tidak boleh menyita energi yang teramat besar dari seluruh persoalan pendidikan. Ada banyak persoalan pendidikan yang lebih penting yang harus didahulukan, yang tidak selalu terkait dengan persoalan sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan, Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fishbein, M. and Ajzen, I. 1975. *Beliefs, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Phillippines: Addison-Wesley Publishing Company, INC.
- Muchlas, Samani 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, ttp: SIC dan APPI.
- Oemar, Hamalik. 2006. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jakarta: Depdiknas.
- Saiffudin, Azwar. 1997. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. 2007. *Sertifikasi Guru*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.